

BAGIAN IV

Pemerintahan Kristen yang Baru: dari Ideologi ke Realitas

Asdi (krissantusamare@gmail.com)

Yulius Aryan Yunianta (y.aryan1206@gmail.com)

Fransiskus Heryman Surya Gadur (albert.bky122@gmail.com)

STIKAS ST. Yohanes Salib – Kalimantan Barat

Pendahuluan

Melalui *Integral Humanism* (1936) Jacques Maritain memberikan paradigma baru terkait hubungan antara iman Kristen dan struktur politik modern. Salah satu konsep pikirannya adalah pengembangan gagasan mengenai pemerintahan Kristen yang baru¹ dengan tujuan untuk menyatukan nilai-nilai Injil dan keberagaman modern yang diperlukan. Fondasi sejarah pemikiran Maritain melibatkan kompleksitas hubungan antara institusi Gereja Kristen dengan negara dan masyarakat pada era pasca-Kekristenan.

Gereja diundang untuk mengenali tanda zaman dan menafsirkannya sesuai dengan ajaran Injil (*GS*, 1965, art. 76), oleh sebab itulah Maritain secara fundamental menanggapi tantangan tersebut dengan memberikan sebuah konsep pemerintahan Kristen baru yang tidak lagi bersifat hegemonik, melainkan inspiratif dan transformatif. Ia sendiri tidak bermaksud mengembalikan sistem Kekristenan Sakral (*Sacral Christendom*)² era abad pertengahan, melainkan sebuah peradaban Kristen baru yang menghormati kebebasan individu, pluralitas sosial, dan otonomi dunia temporal (Maritain, 1973, p. 127-308).

¹ Tatanan disebut “baru” karena berbeda dengan tatanan dunia Kristen pada zaman Abad Pertengahan, yang mengusung sebuah pemerintahan rohani (*sacrum imperium*) yaitu Gereja dan para pejabatnya yang berkuasa baik atas perkara-perkara rohani maupun duniawi.

² Kekristenan Sakral adalah istilah yang mengacu pada budaya sakral. Kata ‘sakral’ berarti sesuatu yang sakral, terkait dengan keilahian, dan layak untuk dipuja atau dihormati secara spiritual. Istilah ‘Kekristenan’ dapat merujuk kepada seluruh umat Kristiani atau wilayah di dunia di mana Kekristenan paling banyak dianut.

Maritain berpendapat bahwa struktur politik modern harus didasarkan pada prinsip *autonomy of the temporal order* yang memungkinkan kebebasan beragama tanpa mengorbankan nilai-nilai moral universal. Konsepnya memperoleh dukungan dalam *Gaudium et Spes*, bahwa kebebasan manusiawi merupakan dasar dalam masyarakat (GS, 1965, art. 41). Maritain memandang pluralisme politik bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai landasan untuk mewujudkan solidaritas sosial dan kasih persaudaraan (Maritain, 1973, p. 162-179).

Humanisme integral dilihat sebagai model pembangunan sosial yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual sebagaimana ditegaskan oleh *Populorum Progressio* (PP, 1967, art. 42). Melalui tulisan ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Maritain mampu membawa ideologi pemerintahan Kristen yang baru ke dalam realitas politik kontemporer.

Pemerintahan Kristen baru yang diusulkan berbeda dari model tradisional dalam model teokrasi abad pertengahan, di mana Gereja memegang kendali langsung atas kekuasaan politik; khususnya dalam hal pemisahan antara kekuasaan rohani dan duniawi temporal, serta penerimaan pluralisme. Sebaliknya, ia menekankan otonomi ranah temporal dan kebebasan individu, sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Kristiani seperti keadilan, kasih, dan persaudaraan. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa iman Kristen memiliki relevansi yang mendalam bagi kehidupan sosial dan politik, tetapi implementasinya harus disesuaikan dengan konteks historis dan budaya yang spesifik. Maritain menawarkan kritik tajam terhadap humanisme sekuler yang ia anggap telah mengarah pada individualisme, materialisme, dan nihilisme (Maritain, 1973, p. 114). Ia berpendapat bahwa hanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan publik, kita dapat membangun masyarakat yang benar-benar manusiawi.

Gagasan Maritain tentang pemerintahan Kristen baru menimbulkan sejumlah pertanyaan penting. Bagaimana prinsip-prinsip Kristen seperti keadilan, kasih, dan persaudaraan dapat diwujudkan dalam praktik politik yang konkret? Bagaimana menyeimbangkan otonomi temporal dengan tuntutan moral iman Kristen? Bagaimana membangun dialog dan kerja sama antar individu dan kelompok yang berbeda keyakinan dalam masyarakat yang semakin pluralis? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi fokus utama dari tulisan ini.

Kajian Literatur

Kritik Maritain terhadap Model Kekristenan Terdahulu dan Dunia Modern

Jacques Maritain mengajukan gagasan tentang pemerintahan Kristen yang baru, yaitu suatu tatanan sosial-politik ideal yang berlandaskan prinsip-prinsip Kristen. Namun, visi ini tidak sekadar menghidupkan kembali model Kekristenan dari Abad Pertengahan. Sebaliknya, Maritain menawarkan sebuah pembaruan radikal yang didasarkan pada pemahaman baru tentang hubungan antara Gereja dan dunia.

Maritain memulai dengan mengkritik model Kekaisaran Suci (*Sacrum Imperium*) atau Kekristenan lama, yang ditandai oleh persatuan erat antara Gereja dan negara. Dalam model ini, Gereja sering memegang kendali atas urusan negara. Menurut Maritain, meskipun model tersebut memiliki beberapa kelebihan, ia juga membatasi otonomi duniawi dan kebebasan individu. Ia juga mengkritik peran penguasa negara dalam model ini, yang cenderung dipandang hanya sebagai bawahan dari otoritas Gereja (Maritain, 1973, p. 149). Maritain menolak hierarki semacam itu dan lebih memilih adanya pemisahan yang jelas antara Gereja dan negara. Selain itu, ia menganggap penggunaan sarana duniawi untuk tujuan spiritual sebagai sesuatu yang bermasalah, karena sering kali mengabaikan nilai intrinsik dunia temporal serta rawan disalahgunakan (Maritain, 1973, p. 150).

Di sisi lain, Maritain juga mengkritik dunia modern, khususnya humanisme sekuler dan liberalisme. Ia menilai keduanya cenderung mendorong individualisme berlebihan, materialisme, dan nihilisme (Maritain, 1973, p. 114). Maritain mengemukakan, bahwa penolakan terhadap dimensi spiritual dan transendensi manusia menyebabkan kekosongan makna yang kemudian diisi oleh ideologi-ideologi totaliter. Ia melihat humanisme sekuler gagal menjawab kebutuhan mendasar manusia akan tujuan hidup yang lebih dalam. Akibatnya, banyak orang terjebak dalam pola hidup konsumerisme dan hedonisme yang dangkal. Sementara itu, liberalisme, meskipun menghargai kebebasan individu, dianggap kurang memerhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama, sehingga memperbesar jurang ketidaksetaraan dan kesenjangan sosial.

Prinsip Pemerintahan Kristen yang Baru

Jacques Maritain menawarkan pandangan yang menarik tentang hubungan agama dan politik dalam visinya tentang Pemerintahan Kristen yang baru. Ia menolak konsep teokrasi, di mana agama menguasai negara, maupun sekularisme radikal, yang

memisahkan agama sepenuhnya dari ranah publik. Sebagai gantinya, Maritain mengusulkan model yang menjadi karakteristik pemerintahan Kristen yang baru.

Menurut Maritain, konsep pemerintahan Kristen yang baru merupakan pembentukan tatanan dunia Kristen yang berbeda dari model yang diterapkan pada Abad Pertengahan. Pada masa itu, Gereja melalui struktur *sacrum imperium*-nya mengendalikan baik urusan spiritual maupun temporal. Dalam tatanan baru ini, peran pemerintahan duniawi diserahkan kepada kaum awam, namun tetap berlandaskan nilai-nilai Kristen. Dengan demikian, terjadi pemisahan yang jelas antara otoritas spiritual atau sakral, yang menjadi tanggung jawab Gereja, dan kekuasaan politik atau temporal, yang dipegang oleh negara.

Pemerintahan Kristen yang baru ini berlandaskan pada kebebasan suci manusia, yang merupakan anugerah dari Allah melalui rahmat-Nya. Kebebasan ini berbeda secara fundamental dari konsep kebebasan yang diusung oleh liberalisme abad ke-19, yang cenderung mendorong kapitalisme dan individualisme melalui gagasan ‘kebebasan tanpa arah’ atau *indifferent freedom*. Selain itu, kebebasan suci ini juga menolak dampak dehumanisasi yang muncul dari sosialisme dan totalitarianisme.

Lima karakteristik yang diusulkan Maritain untuk mencirikan pemerintahan Kristen yang baru: Keadilan Sosial, Personalisme, Pluralisme, Otonomi Temporal, Cinta Persaudaraan sebagai Landasan Utama.

Pembahasan

Visi tentang Pemerintahan Kristen yang Baru

Tatanan Sosial-Politik Baru Berdasarkan Nilai-Nilai Kristen

Pemerintahan Kristen yang baru bukanlah upaya untuk menghidupkan kembali Abad Pertengahan atau bentuk Kekristenan tradisional lainnya. Ia mengkritik model ‘Kekaisaran Suci’ atau ‘Kekristenan Lama,’ yang menurutnya terlalu mengikat Gereja dan negara dalam satu kesatuan, dengan Gereja memegang kendali utama (Maritain, 1973, p. 145-146). Meskipun model ini memiliki sisi positif, Maritain berpendapat bahwa hal tersebut membatasi otonomi duniawi dan kebebasan individu. Model tersebut terlalu terkait dengan kesatuan organik antara Gereja dan negara, yang menimbulkan dominasi institusi Gereja atas urusan duniawi. Maritain menyebut ideal ini *out-of-date* dan sesuatu yang telah selesai (Maritain, 1973, p. 209). Pada konteks ini, model Kekaisaran Suci gagal memberikan ruang bagi perkembangan otonomi temporal. Hal ini dapat ditemukan dalam pandangan tentang ideal baru yang lebih demokratis dan

pluralistik, di mana Gereja tidak mendominasi melainkan bekerja berdampingan dengan negara untuk memastikan penghormatan terhadap martabat individu dan kebebasan sosial (Maritain, 1973, p. 175-177).

Sebaliknya, Maritain membayangkan sebuah tatanan sosial-politik baru yang berlandaskan nilai-nilai inti Kekristenan, seperti keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, visi ini dihadirkan dalam konteks dunia modern yang pluralistik dan demokratis. Pemerintahan Kristen yang baru bukanlah sistem politik yang kaku, tetapi sebuah ideal yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Maritain mendeskripsikan pemerintahan Kristen baru sebagai tatanan berdasarkan nilai-nilai universal Kekristenan, seperti keadilan dan kasih, tetapi diaplikasikan dalam masyarakat yang pluralistik dan demokratis. Ia menggambarkan visi ini sebagai pergeseran dari konsep *sacral temporal order* abad pertengahan ke *Christian lay conception*³ yang lebih sesuai dengan zaman modern (Maritain, 1973, p. 209-210), sehingga untuk merealisasikan hal ini perlu ditekankan pentingnya dialog dan kerja sama antara Gereja dan dunia, serta antar kelompok agama dan ideologi, untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.

Karakteristik Utama untuk Membangun Pemerintahan Kristen Baru

Keadilan Sosial: Keadilan sosial ditempatkan sebagai prinsip sentral dalam pemerintahan Kristen yang baru. Maritain menganjurkan distribusi kekayaan yang adil dan merata, serta akses setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan lainnya. Keadilan sosial di sini bukan sekadar amal, tetapi merupakan kewajiban moral dan politik untuk menciptakan struktur masyarakat yang adil (Maritain, 1973, p. 217). Prinsip ini sejalan dengan ajaran sosial Gereja Katolik, yang ditegaskan dalam berbagai Ensiklik Paus, seperti *Rerum Novarum* (RN, 2022, art. 34 & 36).

Personalisme: Personalisme Kristen, merupakan sebuah filsafat yang menekankan martabat dan keunikan setiap individu sebagai pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Maritain, 1973, 134). Personalisme ini menjadi dasar bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pentingnya kebebasan individu.

³ *Christian lay conception* mengacu pada gagasan tentang bagaimana umat awam menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan mereka sehari-hari di luar struktur formal Gereja. Misalnya, seorang awam Kristen mungkin berfokus pada menerapkan prinsip kasih, keadilan, dan solidaritas di tempat kerja, dalam keluarga, atau dalam aktivitas sosial-politik, tanpa melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan religius formal.

Konsep ini juga berkaitan erat dengan ajaran Gereja tentang martabat manusia, seperti yang diungkapkan dalam *Gaudium et Spes* (GS, 2021, art. 12).

Pluralisme/Kemajemukan: Kemajemukan ini meliputi beberapa bidang, yakni:

Kemajemukan Bidang Politik

Maritain memandang bahwa dalam pemerintahan Kristen yang baru, perlu adanya pengakuan dan penghargaan keragaman dan perbedaan dalam masyarakat. Sangat dianjurkan adanya dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok agama dan ideologi, serta menghormati kebebasan berkeyakinan dan berekspresi (Maritain, 1973, p. 166). Prinsip pluralisme ini merupakan tantangan tersendiri bagi Gereja, yang memiliki kewajiban untuk mewartakan kebenaran iman, tetapi juga harus menghormati kebebasan hati nurani setiap individu. Pemerintahan Kristen yang baru dirancang dengan struktur organik yang mencerminkan keragaman manusia dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Kemajemukan ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, politik, hukum, dan institusi sosial.

Struktur masyarakat yang plural ini akan diintegrasikan dalam sebuah badan politik yang bersifat majemuk, yang bertugas menjaga kebebasan setiap kelompok serta memastikan keberagaman tersebut dihormati. Badan politik ini akan beroperasi berdasarkan prinsip subsidiaritas, yaitu memberikan otonomi sebesar-besarnya kepada setiap kelompok masyarakat untuk mengelola urusannya sendiri sejauh memungkinkan. Selain itu, komposisi internal badan politik ini juga dirancang untuk mencerminkan keberagaman masyarakat yang dilayaninya, dengan perwakilan dari berbagai kelompok untuk memastikan inklusivitas.

Kemajemukan Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi, pemerintahan Kristen yang baru akan mendukung keberlangsungan dua jenis sistem ekonomi secara berdampingan, yaitu ekonomi industri dan ekonomi rumah tangga atau pedesaan. Untuk ekonomi industri, perkembangan teknologi dan penggunaan mesin akan diawasi agar tidak memicu kolektivisme yang berlebihan. Meskipun kolektivitas tidak sepenuhnya dihilangkan, pengelolannya akan diatur demi kepentingan dan kesejahteraan individu manusia. Dalam hal ini, manusia tidak boleh dijadikan korban demi mengejar kemajuan industri semata.

Di sisi lain, ekonomi rumah tangga atau pedesaan akan didukung dan dikembangkan. Unit-unit produksi kecil dan industri rumah tangga yang berbasis kekeluargaan dan komunal akan dipertahankan sebagai bagian penting dari struktur

ekonomi nasional. Melalui kombinasi dua sistem ekonomi yang berbeda ini, Maritain berharap dapat dicapai kesejahteraan ekonomi yang lebih terdistribusi secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum (Maritain, 1973, p. 164-165). Pemerintahan Kristen yang baru akan berupaya mendorong pertumbuhan dan revitalisasi ekonomi rumah tangga dengan memanfaatkan teknologi modern serta badan usaha yang inovatif (Finley, p. 2018). Dalam proses tersebut, hak milik keluarga tetap harus dijaga, dan keterasingan antara manusia dengan hasil kerjanya harus dihindari.

Kemajemukan Bidang Keagamaan

Pemerintahan Kristen yang baru memahami bahwa perbedaan agama merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Dalam masyarakat modern, hubungan antara orang beriman dan mereka yang tidak beriman tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, badan politik Kristen di era modern harus menjadi ruang bersama yang memungkinkan orang beriman dan yang tidak beriman hidup berdampingan, saling berbagi berbagai fasilitas dan kebaikan duniawi secara adil. Masyarakat Kristen modern harus mencakup partisipasi dari orang-orang yang beriman dan tidak beriman, dan bagaimana badan politik Kristen harus mampu menjadi tempat bagi keduanya untuk hidup bersama dan berbagi dalam kebaikan duniawi (Maritain, 1973, p. 206-207).

Pemerintahan Kristen yang baru bertujuan menciptakan masyarakat yang menghormati hak setiap individu untuk menyuarakan pendapat, tanpa memandang agama atau kepercayaannya, dengan memberikan perlindungan yuridis yang memastikan hukum negara tidak bertentangan dengan prinsip agama masing-masing. Demi harmoni sosial, toleransi terhadap praktik ibadah, tradisi, dan cara hidup yang berbeda harus dijaga, meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Kristiani. Pemerintahan ini tidak bertujuan memaksakan kekristenan, melainkan mendorong kesempurnaan hukum alam dan kebebasan yang adil, sebagaimana tercermin dalam semangat hukum Kristiani, sehingga mewujudkan komunitas duniawi yang dihidupkan oleh nilai-nilai Kristen.

Nilai-Nilai Pengikat dalam Masyarakat Kristen dan Kesatuan Minimal

Masyarakat Kristen yang baru tidak bersatu berdasarkan dogma atau iman tertentu, melainkan oleh tujuan bersama yang berfokus pada kebajikan dan nilai-nilai Kristen (Maritain, 1973, p. 206-207). Konsep ini berakar pada kekuasaan Kristus yang universal, di mana hanya di dalam Kristus segala sesuatu, termasuk politik, dapat dibangun dengan benar dan sempurna. Kekuasaan Kristus tidak lagi diwujudkan dalam simbol-simbol eksternal seperti pada Abad Pertengahan, tetapi dalam bentuk yang lebih nyata dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari.

Maritain mengusulkan model pemerintahan campuran (*mixed regime*) yang memiliki karakter demokratis, memungkinkan serikat-serikat politik dalam negara untuk merumuskan sistem dan misinya sendiri, namun tetap berada dalam batasan disposisi umum yang mengatur kebebasan untuk berserikat.

Pada Abad Pertengahan, Gereja menekankan kesatuan yang sempurna dalam Tubuh Mistik Kristus, namun dengan perkembangan zaman, hal itu tidak lagi realistis. Maritain mencanangkan 'kesatuan minimal,' yang terbentuk bukan dari kesatuan iman, tetapi dari persaudaraan manusia yang memegang prinsip yang sama, yaitu nilai-nilai Kristiani (Maritain, 1973, p. 172). Untuk membuat nilai ini diterima, mereka yang menjunjungnya harus memiliki semangat, kekuatan, dan kebijaksanaan politik untuk meyakinkan masyarakat bahwa nilai-nilai ini selaras dengan akal sehat dan kebaikan bersama. Jika nilai-nilai Kristiani diterima oleh minoritas, mereka harus berani memberikan kesaksian hidup dan memperjuangkan kebenaran Kristiani di arena politik.

Otonomi Temporal: Maritain menekankan pentingnya pemisahan antara kekuasaan rohani dan duniawi, serta menolak campur tangan Gereja dalam urusan negara. Ia berpendapat bahwa negara memiliki otoritas untuk mengupayakan kebaikan bersama, sementara Gereja berperan membimbing hati nurani dan memberikan arahan moral kepada masyarakat (Maritain, 1973, p. 182-186). Pandangan ini mencerminkan perkembangan ajaran sosial Gereja mengenai hubungan antara Gereja dan negara, yang semakin mendorong pemisahan yang jelas antara kedua institusi tersebut.

Pemerintahan Kristen yang baru, dengan mengakui badan politik sekuler, juga mengakui otonomi pemerintahan duniawi sebagai alat untuk mencapai tujuan Gereja. Namun, ini bukan berarti bahwa kekuasaan duniawi digunakan untuk kepentingan Gereja atau sebaliknya, sebagaimana yang terjadi pada Abad Pertengahan. Tatahan temporal tidak lagi berperan hanya sebagai alat yang bersifat instrumental bagi spiritualitas, sebagaimana sering terjadi di Abad Pertengahan, melainkan memiliki perannya sendiri yang diakui secara mandiri namun tetap di bawah otoritas spiritual

(Maritain, 1973, p. 176-177). Kedua kekuasaan tersebut bersifat otonom dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Kekuasaan duniawi bertugas untuk mengusahakan kebaikan duniawi seperti makanan, pendidikan, dan infrastruktur, yang pada dasarnya baik dalam dirinya sendiri, tetapi bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir adalah keselamatan jiwa dan kehidupan kekal.

Selain itu, dengan mengakui otonomi kekuasaan duniawi, pemerintahan Kristen yang baru menegaskan bahwa Gereja bukan badan politik. Namun, karakter sekuler badan politik tidak berarti netral atau anti-agama, melainkan menghargai nilai-nilai moral tanpa mengabaikan dimensi spiritual. Maritain juga menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab di hadapan Allah untuk berkolaborasi dengan Gereja dalam mewujudkan Kerajaan Allah di dunia. Di masa lalu, peran pemerintah lebih bersifat paksaan untuk menegakkan hukum Ilahi, namun di masa depan, peran ini akan lebih kepada pengaruh moral, seperti melalui pendidikan dan dukungan terhadap karya sosial yang dilakukan oleh institusi Kristen. Meskipun tugas pewartaan Kristus adalah tanggung jawab Gereja, setiap badan politik Kristen, baik yang rohani maupun duniawi, harus membantu Gereja dalam menjalankan misinya.

Meskipun menganjurkan otonomi temporal, Gereja janganlah menarik diri dari kehidupan publik. Sebaliknya, Gereja harus berperan aktif dalam mempromosikan keadilan sosial, perdamaian, dan persaudaraan (Maritain, 1973, p. 195). Gereja berperan sebagai ‘tanda dan sakramen keselamatan’ bagi dunia, dengan memberikan kesaksian tentang kasih Allah dan menginspirasi umat Kristen untuk terlibat dalam transformasi sosial (Maritain, 1973, p. 186). Konsili Vatikan II sendiri telah memberi penegasan pentingnya peran Gereja dalam dunia modern (GS, 2021, art. 42).

Cinta Persaudaraan sebagai Landasan Utama: hal ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

Masyarakat Duniawi yang Dipersatukan oleh Cinta Kasih

Sebuah pemerintahan Kristen yang baru akan berlandaskan semangat cinta kasih persaudaraan sebagai kekuatan penggerak yang dinamis. Dalam kerangka ini, peradaban Kristen tidak lagi dilihat sebagai karya Ilahi yang diwujudkan oleh manusia di dunia, melainkan sebagai usaha manusia yang diwarnai oleh elemen Ilahi, yakni cinta kasih, yang diintegrasikan ke dalam setiap tindakan dan karya mereka. Namun, perlu disadari bahwa cinta kasih tidak dapat menjadi satu-satunya dasar yang menggerakkan seluruh tatanan masyarakat dunia. Selama manusia hidup di dunia, ia akan terus dipengaruhi oleh berbagai dorongan duniawi seperti materi, uang, kebutuhan biologis

dan sosial, hingga hasrat-hasrat yang rendah. Karena itu, tidak realistis untuk mengharapkan keberadaan badan politik yang mampu mendorong setiap individu untuk bersikap baik dan penuh cinta kasih terhadap sesama. Meski begitu, yang harus kita harapkan dan tuntutan adalah terbentuknya badan politik yang memiliki sistem sosial serta hukum yang baik, yang dilandasi oleh semangat cinta kasih persaudaraan, dan yang secara konsisten mengarahkan kehidupan sosial menuju nilai-nilai tersebut (Maritain, 1973, p. 184-185).

Humanisme Integral sebagai Solusi atas Ketegangan Sosial

Dalam membangun pemerintahan Kristen yang baru, muncul sebuah ketegangan mendasar. Di satu sisi, manusia sebagai anggota masyarakat politis tunduk pada masyarakat serta tanggung jawab bersama yang harus diemban. Namun, di sisi lain, martabat luhur manusia sebagai pribadi menempatkannya lebih tinggi daripada masyarakat dan tugas-tugas tersebut, karena manusia itu sendiri adalah tujuan akhir dari pekerjaan yang dilakukan (Maritain, 1973, p. 205).

Untuk menyelesaikan ketegangan ini, perlu dipahami bahwa kebaikan bersama yang diupayakan masyarakat duniawi adalah kebaikan bersama yang melayani pribadi-pribadi manusia. Dengan demikian, setiap individu yang mengarahkan dirinya pada tugas kolektif masyarakat, pada saat yang sama juga mengarahkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan pribadi orang lain. Maka, setiap badan politik harus menyadari bahwa tujuan utama dari tugas bersama ini adalah pemenuhan kebaikan manusia, tanpa mengesampingkan nilai cinta kasih persaudaraan sebagai dasar.

Tugas dan tujuan bersama ini menjadi kewajiban bagi semua anggota masyarakat dalam pemerintahan Kristen yang baru, baik mereka yang beriman Kristen maupun yang bukan. Pada akhirnya, tugas dan tujuan bersama tersebut menjadi elemen pengikat yang menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat Kristen yang baru.

Tantangan dalam Mewujudkan Pemerintahan Kristen Baru

Sekularisme dan Materialisme: Menghadapi Ideologi-Ideologi Modern yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Kristen

Maritain menganalisis secara mendalam pengaruh sekularisme dan materialisme yang menjadi ideologi utama di era modern. Sekularisme, yang berarti pemisahan agama dari kehidupan publik, dapat menciptakan ruang untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun, Maritain khawatir jika sekularisme berkembang secara ekstrem,

hal ini bisa mengabaikan aspek spiritual dan moral dalam kehidupan masyarakat (Maritain, 1973, p. 97-98). Akibatnya, dasar etis untuk tindakan politik dan ekonomi bisa hilang, sehingga memunculkan relativisme moral dan individualisme yang merugikan (Connolly, p. 1999). Meskipun kebebasan modern diakui, mereka tidak boleh dianggap absolut. Pelaksanaan hak-hak ini dapat dibatasi secara adil oleh kewajiban terhadap kebenaran dan kebaikan bersama, terutama dalam konteks seperti perang yang adil di mana hak-hak individu dapat digantikan untuk keuntungan sosial yang lebih besar (Maritain, 1951, p. 180).

Materialisme, yang menganggap materi sebagai satu-satunya kenyataan, juga menjadi tantangan besar. Pandangan ini dapat mendorong gaya hidup konsumtif, eksploitasi sumber daya alam, dan mengabaikan nilai-nilai spiritual serta kemanusiaan (Maritain, 1973, p. 116-117). Oleh sebab itulah Maritain menawarkan konsep humanisme integral yang menggabungkan dimensi material dan spiritual manusia, sebagai alternatif terhadap materialisme yang sempit. Ajaran sosial Gereja, seperti yang tercantum dalam Ensiklik *Centesimus Annus*, juga mengkritik materialisme dan konsumerisme karena merusak martabat manusia dan mengancam kelestarian lingkungan (CA, 1991, art. 36-39).

Individualisme: Menyeimbangkan Kebebasan Individu dengan Tanggung Jawab Sosial dan Kebaikan Bersama

Maritain mengakui bahwa kebebasan individu adalah salah satu nilai penting dalam masyarakat demokratis. Namun, ia juga mengingatkan tentang bahaya dari individualisme yang berlebihan, yang bisa menyebabkan egoisme, kurangnya kepedulian terhadap orang lain, dan melemahnya ikatan sosial. Pemerintahan Kristen yang baru menawarkan pandangan tentang kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kebebasan individu diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan perhatian terhadap kebaikan bersama. Konsep personalisme Kristen yang dikemukakan Maritain menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang seharusnya hidup dalam komunitas dan saling melengkapi. Konsep Maritain tentang personalisme Kristen menekankan kebebasan yang bertanggung jawab, menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial. Dia berpendapat bahwa manusia secara inheren bersifat sosial, dimaksudkan untuk hidup dalam komunitas, menumbuhkan dukungan timbal balik dan kepedulian terhadap kebaikan bersama untuk memperkuat ikatan sosial (Shestopal et al., p. 2015).

Pelaksanaan kebebasan harus selaras dengan kebenaran moral dan kebaikan bersama. Ini berarti bahwa pada saat konflik, implikasi moral dari pelaksanaan kebebasan harus dipertimbangkan, memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merusak kesejahteraan kolektif masyarakat (Maritain, 1951, p. 180). Setiap hak harus diseimbangkan dengan kebaikan bersama. Negara berhak untuk memberlakukan pembatasan kebebasan individu bila diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa sementara individu memiliki hak, hak-hak ini dapat dibatasi demi menjaga ketertiban dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat .

Konflik dan Ketidakadilan: Mencari Solusi Konkret untuk Masalah-Masalah Sosial dan Politik yang Kompleks

Maritain menyadari bahwa dunia modern penuh dengan konflik dan ketidakadilan, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan perang. Ia mengajak umat Kristen untuk ikut berperan aktif mencari solusi nyata atas masalah-masalah ini, dengan berlandaskan prinsip keadilan sosial, perdamaian, dan persaudaraan (Maritain, 1973, p. 266-267). Maritain menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan kerja sama antara berbagai pihak untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Ia juga mendorong pembentukan lembaga-lembaga internasional yang kuat dan efektif untuk menangani isu-isu global, seperti perubahan iklim dan krisis pengungsi.

Seruan Maritain kepada umat Kristen untuk terlibat aktif dalam mengatasi konflik dan ketidakadilan global bergema dengan diskusi kontemporer tentang keadilan sosial dan tata kelola global. Dia menekankan perlunya dialog, negosiasi, dan kerja sama di antara berbagai pihak untuk menumbuhkan perdamaian dan persaudaraan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam berbagai karya akademis yang menganjurkan pendekatan terstruktur untuk keadilan sosial dan kolaborasi internasional.

Perlu juga bahwa umat Kristen yang berkomitmen untuk perdamaian harus terlibat dengan iklim politik dan mempromosikan dialog, negosiasi, dan kerja sama untuk mengatasi konflik sosial, menumbuhkan kepercayaan dan pemahaman dalam masyarakat yang terpolarisasi untuk membangun komunitas yang lebih damai (Johnson, p. 2021). Orang Kristen harus mempromosikan metode tanpa kekerasan untuk penyelesaian konflik, mendorong keramahan dan dialog, sambil mengakui perlunya kerendahan hati dan pertobatan mengenai tindakan masa lalu, yang mengadvokasi ruang politik bersama untuk mengatasi tantangan kontemporer secara kolaboratif (Bartoli et al., p. 2010).

Dari Ideologi ke Realitas

Jacques Maritain, dalam Integral Humanism, tidak hanya memberikan kerangka ideologis untuk pemerintahan Kristen yang baru atau tatanan Kristen yang baru, tetapi juga menekankan pentingnya peralihan dari ideologi ke kenyataan. Hal tersebut berarti mengubah prinsip-prinsip yang bersifat abstrak menjadi tindakan nyata dan membangun jembatan antara visi ideal dan tantangan yang ada di dunia. Maritain menyadari bahwa mewujudkan tatanan temporal yang didasari oleh nilai-nilai Kristen bukanlah hal yang mudah dan memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, perubahan spiritual dan moral, serta dialog yang berkelanjutan.

Peran Awam: Mendorong Keterlibatan Aktif Umat Kristen Awam dalam Kehidupan Politik dan Sosial

Maritain menempatkan kaum awam sebagai aktor utama dalam mewujudkan pemerintahan Kristen yang baru. Ia menolak pandangan bahwa iman Kristen hanya bersifat pribadi dan terpisah dari kehidupan publik. Sebaliknya, Maritain mengajak umat Kristen awam untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Injil dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ini berarti kaum awam tidak hanya dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berjuang untuk keadilan, perdamaian, dan kebaikan bersama. Dokumen Konsili Vatikan II, *Apostolicam Actuositatem*, secara khusus menegaskan peran kaum awam dalam misi Gereja di dunia dan mengajak mereka untuk berperan aktif dalam mewujudkan Kerajaan Allah di bumi.

Dialog dan Kolaborasi: Membangun Jembatan dengan Kelompok-Kelompok Lain untuk Mewujudkan Keadilan dan Perdamaian

Maritain menyadari bahwa pemerintahan Kristen yang baru tidak bisa diwujudkan hanya oleh umat Kristen saja. Ia menekankan pentingnya dialog dan kerja sama dengan berbagai kelompok lain, termasuk mereka yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Maritain percaya bahwa dengan membangun komunikasi dan kerja sama, kita bisa menemukan kesamaan nilai dan tujuan untuk mencapai keadilan dan perdamaian. Dialog bukan berarti mengorbankan prinsip-prinsip iman, tetapi merupakan cara untuk saling mengenal, menghormati, dan mencari solusi bersama atas masalah-masalah yang dihadapi.

Transformasi Spiritual dan Moral: Menekankan Pentingnya Pembentukan Karakter dan Kesadaran Moral bagi Para Pemimpin dan Warga Negara

Maritain menegaskan bahwa perubahan sosial harus diikuti dengan perubahan spiritual dan moral. Ia percaya bahwa untuk membangun struktur sosial yang adil dan berkelanjutan, diperlukan dasar karakter dan kesadaran moral yang kuat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan karakter dan pengembangan kesadaran moral bagi para pemimpin dan warga negara. Selain itu, ia mengajak agar pendidikan tidak hanya fokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang memiliki integritas, kasih sayang, dan tanggung jawab. Ajaran sosial Gereja juga menekankan pentingnya kesadaran moral dalam kehidupan publik dan mengajak para pemimpin serta warga negara untuk memegang prinsip-prinsip moral dalam membuat keputusan dan bertindak.

Ini menekankan bahwa masyarakat yang terlepas dari Tuhan dan keyakinan agama pada dasarnya cacat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang membimbing masyarakat manusia harus berakar dalam kerangka agama untuk memastikan integritas moral dan kesatuan sosial (Maritain, 1951, p. 184).

Penutup

Gagasan Maritain tentang pemerintahan Kristen yang baru adalah tanggapan visioner terhadap hubungan yang kompleks antara politik, iman Kristen, dan masyarakat modern. Maritain menawarkan paradigma baru yang menghormati kebebasan individu, pluralisme, dan otonomi duniawi sambil mempertahankan nilai-nilai spiritual. Ini membedakannya dari model Kekristenan tradisional.

Keadilan sosial, personalisme, pluralisme, otonomi temporal, dan cinta persaudaraan adalah lima ciri utama pemerintahan Kristen baru yang diusulkan Maritain. Meskipun model ini tidak bertujuan untuk mengembalikan dominasi Gereja atas negara, itu bertujuan untuk menciptakan ruang di mana prinsip-prinsip Kristen dapat diintegrasikan secara bebas dalam kehidupan sosial-politik.

Maritain menegaskan bahwa pemerintahan ini harus memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai budaya, agama, dan ideologi dalam sebuah kesatuan minimal yang didasari oleh kemanusiaan. Gereja tidak lagi memegang kendali langsung; sebaliknya, mereka bertanggung jawab untuk membimbing moralitas dan memberikan arahan moral.

Referensi

- Bartoli, A., Ostrolenk, M. D., Awad, M., & Khan, S. (2010). Overcoming violence: A dialogue on conflict resolution in the Middle East. *Review of Faith and International Affairs*, 8(3), 27–39. <https://doi.org/10.1080/15570274.2010.504029>
- Connolly, W. E. (1999). Some These on Secularism. *Cultural Anthropology*, 26(4), 648–656. <https://doi.org/10.1111/j.1548-1360.2011.01117.x>
- Finley, E. B. (2018). Catholicism and Democratism: The Case of Jacques Maritain. *Journal of Church and State*, 00(0), 1–21. <https://doi.org/10.1093/JCS/CSY081>
- Johnson, R. (2021). Building Peace in a Culture War: Christian Witness in a Polarized Society. *Political Theology*, 22(3), 228–247. <https://doi.org/10.1080/1462317X.2021.1905333>
- Maritain, J. (1951). Man and the State. In *Charles R. Walgreen Foundation Lectures*. The University of Chicago Press.
- Maritain, J. (1973). *Integral Humanism: Temporal and Spiritual of a New Christendom*. University of Notre Dame Press.
- Paulus VI. (2021). Ensiklik Populorum Progresio (Perkembangan Bangsa-bangsa). In A. S. Suhardi (Ed.), & R. Hardawiryana (Trans.), *26 Maret 1967*. Dokpen KWI.
- Paus Leo XIII. (2022). Ensiklik Rerum Novarum (Hal-Hal Baru). In R. Hardawiyarna (Trans.), *5 Mei 1891*. Dokpen KWI.
- Paus Paulus VI. (2021). Konstitusi Pastoral tentang Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan). In R. Hardawiryana (Trans.), *1965*. Dokpen KWI.
- Shestopal, S. S., Astakhova, K. V., & Astakhov, V. V. (2015). Modern Dimensions of Jacques Maritains Political and Legal Personalism. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 192–197. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s3p192>
- Yohanes paulus II. (1991). Ensiklik Centesimus Annus (Ulang Tahun ke-Seratus Ensiklik Rerum Novarum). In *1 Mei 1991*. Dokpen KWI.

Profile Penulis



ASDI, S.Th., lahir di Kampet, 24 Oktober 1995, tinggal di Pusat Kerohanian Karmel Bandol, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat – Indonesia, email: krisantusamare@gmail.com. Pendidikan: Sarjana Teologi STIKAS St. Yohanes Salib pada Tahun 2023. Saat ini studi Program Imamat di STIKAS St. Yohanes Salib, Kalimantan Barat. Saat ini tergabung sebagai anggota religius di Kongregasi Carmelitae Sancti Eliae (CSE).



YULIUS ARYAN YUNIANITA, SH., S.Th., lahir di Klaten, 12 Juni 1983, email: y.aryan1206@gmail.com. Saat ini berdomisili di Landak, Kalimantan Barat. Pendidikan: Lulus dari Program Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005; Lulus Program Sarjana Teologi dari STIKAS St. Yohanes Salib, Kalimantan Barat pada tahun 2024. Saat ini sedang menempuh pendidikan lanjut Program Imamat di STIKAS Santo Yohanes Salib, Kalimantan Barat. Pengalaman bekerja: *Legal Officer of Special Task Force for Branch Office* di PT. Bank Panin Tbk., *Finance and Marketing Officer* di PT. Kanisius, *Legal Manager of Corporate Social Responsibility* di PT. Swakarsa Sinarsentosa (DSN Group Tbk.). Saat ini tergabung sebagai anggota religius di Kongregasi Carmelitae Sancti Eliae (CSE).



FRANSISKUS HERYMAN SURYA GADUR, S.S., M.Hum., lahir di Ruteng, Manggarai. Berdomisili di Landak, Kalimantan Barat, Indonesia, email: albert.bky122@gmail.com. Pendidikan: Lulus Program Sarjana Teologi STFT Widya Sasana Malang. Lulus Program Magister STFT Widya Sasana Malang. Pengalaman kerja: STIKAS Santo Yohanes Salib, Jabatan fungsional saat ini adalah Asisten Ahli. Bertugas sebagai Pastor Paroki di Gereja Paroki St. Theresia dari Kanak-kanak Yesus - Simpang Tiga, Untang, Banyuke Hulu sekaligus sebagai anggota religius di Kongregasi Carmelitae Sancti Eliae (CSE).